

SURYA Keadilan

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN : 2599-2252; E-ISSN : 2622-5166

Vol.3, No. 1, Mei 2019



Penerapan Sanksi Hukum pada Aparat Hukum (Polisi) terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana

I.Rusyadi¹

Ardykha Eka Dharma Tumbelaka²

E-mail: ¹irusyadi@unikadelasalle.ac.id

²ardyekadharm@gmail.com

^{1,2}Universitas Katolik De La Salle Manado

ABSTRAK

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 42 ayat (1) bahwa Penyidik berwenang memerintah kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Dalam kenyataan barang bukti yang merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan disalahgunakan dengan memanfaatkan barang bukti tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Seperti perkara perbankan terjadi penggelapan barang bukti oleh aparat kepolisian dari Polda Sulut yang menggelapkan barang bukti sekitar 7,7 Milyar. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui terjadi penyalahgunaan kewenangan aparat hukum (Polisi) terhadap barang bukti hasil sitaan tindak pidana (2) untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap aparat hukum (Polisi) yang menyalahgunakan barang bukti hasil tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penyalahgunaan barang bukti terjadi karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diatur oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik serta adanya kesempatan untuk mengambil barang sitaan hasil tindak pidana (2) Penerapan sanksi hukum berupa kode etik kepolisian serta sanksi pidana berdasarkan putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.Mnd berdasarkan ketentuan hukum.

Kata kunci : Penyalahgunaan kewenangan, barang bukti, polisi

ABSTRACT

In the Criminal Procedure Code Article 42 paragraph (1) that the Investigator has the authority to order the person who controls objects that can be confiscated, submit the object to him for the purpose of inspection and the person who submits the item must be given a receipt. In reality, the evidence which is a very important element in the judicial process is misused by utilizing the evidence for the personal and group interests. As in the banking case, there was embezzlement of evidence by the police officer of the North Sulawesi Regional Police Department around 7.7 billion rupiah. The purpose of this study (1) is to find out the misuse of the authority of the law apparatus (evidence) of confiscated evidence of crime (2) to find out the application of criminal sanctions toward law enforcement officers (Police) who misuse evidence of criminal offenses. The method used in this study is Empirical Jurisdiction. The results obtained from this study are (1) The misuse of evidence occurs due to misuse of positions regulated by the police in this case the investigator and the opportunity to take confiscated goods resulting from criminal acts (2) Application of legal

sanctions in the form of police ethical codes and criminal sanctions based on decision Number 242 / Pid.B / 2015 / PN.Mnd based on legal provisions.

Keywords: *Authority misuse, evidence, police*

PENDAHULUAN

Saat ini kejahatan marak terjadi di Negara kita ini karena kejahatan tidak mengenal tempat atau pun waktu dan terjadi kapanpun. Tingkat kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan karena gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini kejahatan sering disamakan dengan tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Di masa sekarang tindak pidana banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat, misalnya tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya untuk mencegah tindak

pidana pemerintah membuat lembaga-lembaga atau aparat-aparat yang menegakkan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, lembaga Peradilan dan lain sebagainya.

Lembaga Kepolisian, Kejaksaan serta lembaga-lembaga Peradilan memiliki peranan dan fungsi untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Kepolisian dan kejaksaan berperan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu tindak pidana untuk menentukan tersangka dan mengumpulkan barang bukti guna untuk kepentingan persidangan

Barang bukti memiliki peranan yang sangat penting bagi lembaga peradilan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum keadilan serta untuk memutuskan suatu perkara dalam persidangan. Barang bukti adalah sesuatu hal yang dicari atau ditemukan oleh pihak kepolisian, maka untuk mendapatkan barang bukti pihak

kepolisian melakukan penyitaan dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan, dari hasil penyitaan tersebut maka barang bukti bisa diamankan dan bisa menjadi salah satu kekuatan untuk mendakwa seseorang yang melakukan tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.

Pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penyitaan untuk kepentingan peradilan. Namun, kenyataan barang bukti yang merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan malah disalahgunakan dengan memanfaatkan barang bukti tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Seperti perkara perbankan yang melibatkan terjadi penggelapan barang bukti oleh aparat kepolisian dari Polda Sulut yang menggelapkan barang bukti sekitar 4 Milyar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi yaitu 1). bagaimanakah penyalahgunaan wewenang dari aparat hukum (Polisi) terhadap barang bukti hasil sitaan tindak pidana?.2). Bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana terhadap aparat hukum (Polisi) yang menyalahgunakan barang bukti hasil tindak pidana ?

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum yakni yuridis empiris. Metode verifikasi empiris diadakan untuk menjawab masalah-masalah dalam ruang lingkup ilmu yang bebas nilai.¹

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Wewenang Dari Aparat Hukum (Kepolisian) Terhadap Barang Bukti Hasil Tindak Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tak pernah lepas dari yang namanya penyalahgunaan. Di mana penyalahgunaan identik dengan penggunaan jabatan atau profesi yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penilitian Hukum. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. .2005, hlm 18

menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, penyalahgunaan seperti pengambilan keputusan, atau tentang hal-hal yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Penyalahgunaan banyak terjadi dalam berbagai bidang pemerintah, non pemerintah atau dalam suatu organisasi-organisasi/ kelompok-kelompok tertentu.

Masalah tentang penyalahgunaan masuk dalam instansi dalam bidang hukum seperti instansi kepolisian yang merupakan salah satu pemberi contoh masyarakat dalam menjalankan suatu peraturan dengan baik dan teratur. Dalam masalah ini instansi kepolisian menyalahgunakan kewenangan sebagai aparat hukum dalam menggelapkan suatu barang bukti hasil tindak pidana.

Barang bukti merupakan salah satu unsur untuk membuktikan benar atau salahnya seseorang dalam melakukan tindak pidana. Tetapi, dalam kenyataannya barang bukti yang merupakan unsur yang terpenting tetapi disalahgunakan oleh aparat hukum dalam hal ini instansi kepolisian. Untuk itu dalam menerapkan hukum kepada aparat hukum yang menyalahgunakan kewenangan dalam hal ini menggelapkan barang bukti hasil

tindak pidana ada aturan tersendiri yang mengaturnya seperti kode etik kepolisian, serta Undang-Undang Kepolisian.

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat yang mengeluarkan surat perintah tentang pejabat yang mengelola barang bukti ialah:³

² Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2014, hlm. 21

³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia .

- a. Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri
- b. Direktorat Reskrim/Narkoba/Lantas/Polair pada tingkat Polda
- c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes
- d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta dan
- e. Kapolsek/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.

Sedangkan pada Pasal 9 ayat 3 dijelaskan tentang pejabat yang mengelola barang bukti ialah:

- a. Ketua Pengelola Barang Bukti berpangkat Perwira
- b. Staf urusan administrasi Barang Bukti serendah-rendahnya berpangkat Brigadir
- c. Staf pembantu umum serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri.

Ada beberapa pengecualian bagi para Pejabat Pengelola Barang Bukti pada tingkat Polsek disebutkan pada ayat 4 disebutkan bahwa: dalam hal Polsek tidak memiliki PPBB yang berpangkat perwira, dapat ditunjuk Kanit Reskrim yang berpangkat Brigadir sebagai Ketua Pengelola Barang Bukti.⁴

Selain pihak kepolisian melakukan tugas pokoknya, tugas lainnya yakni melakukan penggeledahan serta penyitaan. Di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) ditentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti, yakni sebagai berikut:

- a. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32, untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan dan menurut tata cara ditentukan dalam Undang-undang. Pasal 37 KUHP ayat 1: pada waktu menangkap tersangka penyidik hanya berwenang menangkap tersangka, penyidik berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang di bawahnya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pasal 37 KUHP ayat 2, pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian atau menggeledah badan tersangka.
- b. Penyitaan (diatur dalam pasal 38 ayat 1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat. Pasal 46 KUHP ayat 1: benda yang dikenakan penyitaan

⁴ *Ibid*

dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak terhadap benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak terhadap benda tersebut. Pasal 128 KUHP: dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 130 KUHP ayat 1 KUHP: benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan jumlahnya menurut jenis masing-masing maupun sifat khas tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi cap jabatan yang ditandatangani oleh penyidik.

- c. Penyitaan surat (diatur dalam Pasal 47 ayat 1), penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan untuk itu

dari ketua pengadilan negeri. Pasal 47 ayat 2: untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kantor pos dan telekomunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk diberikan surat tanda penerimaan. Pasal 49 ayat 1 KUHP: penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 75 KUHP. Pasal 131 KUHP : dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau surat daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 dengan tegas menyatakan: penyitaan hanya dapat dilakukan oleh

penyidik. Dengan penegasan pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan "Pengecualian" penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik langsung menyita sesuatu benda dan alat:

- a) Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau
- b) Benda dan alat "patut diduga" telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- c) Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

Menurut Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa: Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Ketentuan Pasal 40 sangat beralasan, langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Di samping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40, Pasal 41 memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket:

- Menyita paket atau surat
- Atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi atau pengangkutan
- Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda

⁵ M. Yahya Harahap,,Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hlm. 266-272

tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka

- Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang dengan demikian penyidik harus membuat surat tanda terima kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu dapat disita

Pada ketentuan pasal 41, pengertian tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyatanya sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat atau benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik. Penyitaan langsung juga berdampak pada permasalahan mengenai kasus penggelapan barang bukti. Dalam kasus tersebut aparat Kepolisian memanfaatkan situasi untuk menggelapkan barang bukti sejumlah uang sekitar 4 Milyar. Kasus

penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum (Polisi) akan dijelaskan secara jelas dalam contoh kasus.

Contoh Kasus

Kasus penggelapan barang bukti bermula sejak ditangkapnya JM selaku Pegawai Bank BNI Cabang Manado yang dikukuhkan sebagai asisten dengan penyesuaian grade posisi J.01 dan ditempatkan secara definitif pada Kantor cabang Manado berdasarkan surat keputusan kantor wilayah 11 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor: KP/067/M11/4.1 pada tanggal 12 Juli 2007 yang dengan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam atau dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank berupa uang sebesar Rp 7.869.510.00,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar USD 3.823,- (tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga).⁶

Uang sebesar 7 milyar tersebut didapat terdakwa dari dari nasabah Garuda Indonesia yang disetor pada tanggal 20 desember 2013, uang setoran dari Multimart Tuminting

⁶ Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-24/R1.10/Ep. 1/03/2014

diambil tersangka pada tanggal 24 desember 2013 uang tersebut telah digelapkan terdakwa dan dipakai untuk keperluan pribadinya. Kemudian pada tanggal 2 januari 2014 terdakwa bersama para karyawan maupun security pergi mengambil uang setoran dari kantor layanan nasabah Amurang, Bahu, Ranotana, mantos 2. Uang yang didapat tersangka dari penyetoran tersebut sebesar Rp 7.728.300.00 (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut diantar bersama karyawan BNI serta security ke kantor BNI Pusat untuk dihitung dan dimasukkan dalam kas bank BNI, terdakwa kemudian menyuruh kepada karyawan BNI tersebut untuk masuk di Kantor untuk membuka pintu namun terdakwa hanya menunggu dimobil. Setelah para karyawan lain serta security masuk di kantor terdakwa membawa lari uang tersebut dan sempat dilihat oleh security yang keluar dari kantor. Uang-uang setoran didapat oleh tersangka dipakai untuk membeli sebuah mobil Daihatsu Terios Warna Silver, motor jenis Honda vario

perhiasan emas, kursi tidur dan handphone.⁷

Bahwa seharusnya terdakwa membawa uang nasabah ke kantor BNI cabang Manado untuk dilakukan pencatatan dalam laporan pembukuan atau pencatatan dalam laporan transaksi tetapi terdakwa membawa lari uang tersebut. Kemudian selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di perumahan Tamara Desa Kima Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.893.215.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan selebihnya uang sebesar kurang lebih Rp 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah) belum ditemukan dan masuk dalam daftar pencarian barang bukti.⁸

Tanggal 10 Januari tersenut JM ditangkap oleh anggota timsus penyidikan segala bentuk tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara tempatnya di perumahan Tamara Desa Kima Kecamatan Mapanget Kota

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Manado. Bahwa ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang tersimpan dalam mobil terios yang ketika digunakan oleh JM yang pada saat itu menjadi tersangka penggelapan dana nasabah sebanyak lima koper

HJ pada saat itu mengambil koper yaitu koper yang berwarna coklat dan koper sedang berwarna hitam yang semua berisi uang milik BNI cabang Manado ke dalam mobil Terios sedangkan dua koper lain yakni dipindahkan oleh anggota timsus sebut saja AM di mobil fortuner namun dalam perjalanan HJ menelpon bahwa uang yang berada di koper tersebut disimpan di rumah AM dan menyimpan koper tersebut di gudang dekat rumahnya, dalam penangkapan tersebut AM menembak kaki dari tersangka JM kemudian setelah menembak kaki dari tersangka JM, teman dari AM yakni FS dan GS untuk mendokumentasikan atau memotret barang bukti berupa tiga buah koper yang berada didalam mobil terios serta membawa JM kerumah Sakit untuk tahap pengobatan atas luka tembak.

Kemudian setelah tiba di Rumah Sakit mengantar JM, petugas timsus

HJ, MM, JM melakukan pembicaraan untuk menyisihkan atau mengambil uang sebesar 2 milyar dengan rincian 800 juta kepada anggota timsus , 200 juta kepada tim penyidik dan 1 milyar kepada YL. Lalu HJ menyuruh kepada AM untuk mengambil dua koper yang diambil dari barang bukti serta berkumpul di rumah HJ yang ada di Citraland serta membagikan uang tersebut kepada masing-masing timsus dan uang yang di miliki oleh HJ pada saat sekitar 1 milyar keseluruhannya⁹

Berdasarkan contoh kasus, bahwa kasus yang melibatkan aparat hukum dalam hal ini anggota kepolisian terjadi karena anggota kepolisian menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyidik dengan menggelapkan barang bukti disebabkan karena perintah jabatan disalahgunakan, memanfaatkan jabatan demi untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Aparat Hukum (Polisi) Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap hukum pidana harus terdiri dari unsur-unsur

⁹ *Ibid*

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan, oleh karena itu munculnya sifat-sifat yang melawan hukum. Ada kalanya sifat melawan hukum tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak dalam hati terdakwa. Misalnya pada pasal 362. Di sini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.¹⁰

Berdasarkan dari sifat yang melawan hukum maka terdapat suatu penegakkan sanksi hukum terhadap orang yang melawan hukum. Kasus penggelapan barang bukti yang menjerat anggota kepolisian diberikan sanksi kode etik dalam instansinya serta sanksi hukum pidana.

Penegakan sanksi hukum pada anggota kepolisian yang melanggar aturan profesinya tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Pasal 21 ayat (1) dicantumkan bahwa: Anggota Polri yang dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20

ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapkan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian , kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu bulan)
- d. Di pindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan atau
- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota kepolisian.¹¹

¹⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 69

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

Pasal 21 Ayat (3) disebutkan bahwa Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang dilakukan pelanggaran meliputi:

- a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polisi
- b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian
- c) Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyatanya bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau pemerintah Republik Indonesia
- d) Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji jabatan dan/atau KEPP
- e) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu kurang lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut
- f) Melakukan perbuatan dengan berperilaku yang dapat merugikan

dinas kepolisian, antara lain berupa:

- 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian
 - 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan didalam atau diluar dinas dan
 - 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
 - h) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi

anggota partai politik dan setelah itu diperingatkan/ditegur masih tetap dipertahankan statusnya itu

- h. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.¹²

Dalam kasus yang melibatkan anggota kepolisian tentang penggelapan barang bukti, penerapan sanksi hukum yang diterapkan terlebih dahulu ialah penegakkan kode etik

Terdakwa atas nama HJ diberhentikan secara tidak dengan hormat oleh instansi kepolisian karena berusaha menggelapkan barang bukti uang BNI 46 senilai Rp 4 Milyar pada hari jumat 10 Januari 2014 dengan menangkap terpidana karyawan bank BNI atas nama JM di perumahan Tamara Kecamatan Mapanget dengan barang bukti 5 koper berisi 7,7 Milyar.¹³

Amar Putusan

Dalam kasus ini terdakwa atas nama HJ diberhentikan secara tidak dengan hormat oleh instansi kepolisian berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Kemudian setelah diberhentikan sebagai anggota kepolisian diadili di Pengadilan Negeri Manado dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan dari kasus penggelapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian maka terdakwa didakwakan dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Barangsiapa
- 2) Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
- 3) Unsur sesuatu barang yang sama sekali bukan atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
- 4) Unsur yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

➤ Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

- a. Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat

¹² *Ibid*

¹³

<http://www.tetengkoreng.com/2015/02/putusan-sidang-kode-etikhendra-jakob>. Diakses pada Tanggal 23/06/2016. Pukul 18.45 WITA.

b. Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT Bank BNI Cabang Manado

c. Terdakwa sudah pernah dihukum

➤ Hal-hal Yang Meringankan Terdakwa

a. Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Bank BNI cabang Manado

b. Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuannya

c. Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya

d. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.¹⁴

Berdasarkan Petikan Putusan pengadilan Manado telah melanggar Ke satu Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUH Pidana atau kedua pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan bahwa:

a) Menyatakan bahwa terdakwa HJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama

b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HJ dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

c) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan

d) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

e) Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Uang Sebesar Rp 1.243.000.000. (Digunakan dalam perkara MM)

2) 1 (satu) unit mobil jeep Wranglor Rubicon warna hitam, nomor rangka 1C4HJWMG2DL681003 dan nomor mesin : DL681003, Nomor Polisi B 1618 SHN. (dikembalikan kepada S)

3) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sporty warna putih mutiara, Nomor rangka MMBGYKG40DD004503 Nomor mesin : 1D56UCEB1679, Nomor Polisi DB 1430 FA (dikembalikan kepada HJ)

4) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova, warna hitam

¹⁴ Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-15/M.Ndo/Epp.2/06/2015.

metalik Nomor rangka
MHFXW42G582115289,
Nomor mesin : ITR6550369,
Nomor polisi DB 1673 QL
(dikembalikan kepada HJ)

- 5) 1 (satu) pucuk senjata api
jenis Revolver No seri CPP
24422R atas nama HJ
(dikembalikan kepada pihak
Polda)
- 6) 1 (satu) pucuk senjata api
laras panjang jenis AK 101
atas nama FP (dikembalikan
kepada pihak Polda)
- 7) 1 (satu) unit bangunan
rumah (dikembalikan kepada
HJ)

Perkara atas nama terdakwa HJ
diputuskan dalam rapat majelis hakim
pada hari Senin tanggal 14 september
2015 di PN.

Analisi Yuridis

Penerapan sanksi hukum tentang
kasus yang melibatkan anggota
kepolisian berdasarkan pada aturan
dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2014 Tentang Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia
pasal 21 Ayat (3) huruf f. Alasannya

adalah kasus ini melibatkan anggota
kepolisian yang menyalahgunakan
kewenangan dengan diberikan sanksi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH). Setelah diberhentikan sebagai
anggota kepolisian terdakwa dikenakan
hukum pidana umum karena sudah
menjadi warga sipil. Dalam hukum
pidana terdakwa atas nama HJ
dikenakan Pasal 363 atau 372 KUHP jo
Pasal 55 ayat (1). Pasal yang dikenakan
tersangka terbukti memenuhi unsur-
unsur tindak pidana. Dua pasal
dikenakan yakni disebut dakwaan
alternatif karena dakwaan alternatif
dipergunakan apabila dakwaan yang
satu tidak disebut dengan tindak
pidana, maka dapat memilih dakwaan
yang kedua sedangkan Pasal 55 yang
disebutkan dalam amar putusan
dimaksudkan bahwa terdakwa
melakukan tindak pidana secara
bersama-sama atau dengan kata lain
tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.

PENUTUP

1. Penyalahgunaan kewenangan
terjadi karena adanya unsur ingin
mementingkan kepentingan diri
sendiri atau kelompok serta adanya
unsur yang menguntungkan bagi

para kelompok tertentu misalnya aparat hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Penyalahgunaan barang bukti terjadi karena adanya permainan jabatan dalam hal ini masalah penyitaan barang bukti yang diatur oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik serta adanya kesempatan untuk mengambil barang sitaan hasil tindak pidana.

2. Proses penerapan sanksi yang dilakukan oleh aparat hukum dalam hal ini pihak kepolisian yakni para anggota polisi diterapkan sanksi keanggotaan dalam hal ini penegakkan kode etik kepolisian. Dalam hal ini penegakkan kode etik dilakukan apabila anggota polisi melakukan tindak pidana yang mencerminkan instansi diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran lebih dari dua kali setelah diberhentikan anggota kepolisian di proses juga peradilan negeri karena telah menjadi anggota masyarakat.

Saran

1. Perlu dibuatnya atau ditambah pelatihan-pelatihan khusus seperti pendidikan kode etik selama masa pendidikan di instansi kepolisian serta penjelasan batasan tugas

serta kewenangan kepolisian dalam melakukan proses penyidikan sehingga kewenangan jabatan tidak akan terjadi.

2. Pihak kepolisian harus menindak dan memberikan hukuman secara tegas dan adil bagi aparat hukum dalam hal ini anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana baik ringan maupun berat agar tidak menimbulkan kecemburuan social terutama mengenai masalah pemidanaan antara anggota kepolisian dan masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

Buku

Alfitra, 2014. *"Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia"*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Harahap Yahya, 2012. *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP"*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki Peter Mahmud. 2014. *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana.

Moelatno.2014. *"Asas-Asas Hukum"*, Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Bukti Di
Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 Tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2011 Tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-
24/R1.10/Ep.1/03/2014

Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-
15/M.Ndo/Epp.2/06/2015

Petikan Putusan No : 242/Pid.
B/2015/PN. Mnd

Internet

<http://www.tetengkoreng.com/2015/02/putusan-sidang-kode-etikhendra-jakob>.